



Community Participation in Compilation of Village Mid-Term Development Plans (RPJM-Des) in Kedungbanteng Village Tanggulangin District Sidoarjo Regency

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Halimatus Sa'diyah¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah^{*,2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id.

Abstract. *This research aims to identify the level of community participation and involvement in the preparation of the Village Medium Term Development Plan (RPJM-Des) document in Kedungbanteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. In this research, qualitative methods were used, and informants were selected using a purposive sampling method. Data was obtained through three data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Primary data was collected from observations and interviews with relevant respondents, while secondary data came from literature studies which included books, articles, scientific journals and documents related to the Village Medium Term Development Plan (RPJM-Des). The results of research on community participation or involvement in the process of preparing the RPJM-Des document in Kedungbanteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency show that; First, the participation indicators in the planning stage are still not optimal, where from several meetings held by the Kedungbanteng village government, less than 50% of the community's attendance rate. Second, the participation indicators in the implementation stages are quite optimal, both in the implementation of physical and non-physical development carried out in Kedungbanteng village. Third, participation indicators in the utilization stage are also quite optimal, because many Kedungbanteng village residents have been helped by the programs and development carried out by the village, both physical and non-physical development.*

Keywords: *Participation, Preparation, RPJM-Des.*

Abstrak. *Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat pada penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan, dan informan dipilih dengan metode purposive sampling. Data diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara dengan responden yang relevan, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang mencakup buku, artikel, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Hasil dari penelitian tentang partisipasi atau keterlibatan masyarakat pada proses penyusunan dokumen RPJM-Des Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo ini menunjukkan bahwa; Pertama, Indikator Partisipasi dalam tahapan perencanaan masih belum optimal, dimana dari beberapa rapat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Kedungbanteng kurang dari 50% tingkat kehadiran Masyarakat. Kedua, indikator Partisipasi dalam tahapan pelaksanaan cukup optimal, baik dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan desa kedungbanteng. Ketiga, indikator partisipasi dalam tahapan pemanfaatan juga sudah cukup optimal, karena sudah banyak Masyarakat desa kedungbanteng yang terbantu dengan program dan pembangunan yang dilaksanakan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik.*

Kata Kunci : *Partisipasi, Penyusunan, RPJM-Des*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah keinginan atau kehendak yang berlangsung secara terus menerus untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan menyeluruh dalam berbagai aspek[1]. Menurut Husein Umar (2004:8) Pembangunan dapat dipahami sebagai suatu usaha menuju sebuah perubahan yang lebih baik berdasarkan norma yang ada melalui pendayagunaan sumber daya, sedangkan Menurut Afifuddin (2012:42) pembangunan dapat di katakan proses membangun bangsa secara menyeluruh dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat[2]. Pembangunan sebuah negara dapat dikatakan baik jika menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, kemudian dilaksanakan menjadi sebuah aturan atau kebijakan otonomi daerah dimana peraturan

atau kebijakan tersebut merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan dan kepentingan pemerintahan daerahnya sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014[3].

UU No 25 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai tata cara perencanaan pembangunan nasional, dengan penekanan pada pentingnya melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan, baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)[4]. Selain itu, Undang-Undang terkait pemerintahan daerah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang merupakan pelaksanaan dari UU No 6 Tahun 2014 terkait Desa, juga menekankan perlunya melibatkan masyarakat pada penyusunan perencanaan pembangunan. Pentingnya peraturan seperti Permendes, PDTT No 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mencerminkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada di desa.[5].

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan sebuah dokumen yang merinci kebijakan pembangunan desa untuk periode 6 tahun. Dokumen ini dibuat dengan mempertimbangkan visi dan misi kepala desa dan melibatkan seluruh komunitas desa dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang-Desa). Di dalamnya terdapat arah kebijakan atau aturan pembangunan desa dan berbagai konsep kegiatan yang mencakup berbagai bidang[6]. RPJM-Des digunakan sebagai panduan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Keputusan yang telah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014[7].

Desa Kedungbanteng terletak di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dengan luas wilayah mencapai 149,66 hektar. Desa ini terdiri dari satu dusun, empat RW, dan sembilan RT, dengan populasi penduduk sebanyak 3086 orang. Sesuai dengan Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 03 Tahun 2022 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Dalam konteks ini, UNDP (United Nations Development Programme) menguraikan sepuluh prinsip good governance yang bertujuan untuk memastikan tercapainya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien [8].

Untuk mencapai perencanaan pembangunan desa Kedungbanteng yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat merupakan suatu keharusan dalam proses penyusunan dokumen RPJM-Des dan RKP-Des Desa Kedungbanteng. Sesuai dengan Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 3 Tahun 2022 mengenai RPJM-Des Desa Kedungbanteng tahun 2023, terdapat sejumlah masalah prioritas yang harus diatasi oleh desa sesuai dengan kewenangannya.

Prioritas masalah yang disusun pada dokumen RPJM-Des Desa Kedungbanteng Tahun 2023 di berbagai bidang, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa hingga bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak, merupakan permasalahan yang cukup kompleks sehingga apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan yang lebih besar yang akan mengancam kesejahteraan masyarakat Desa Kedungbanteng.

Menurut Ericson dalam Slamet (1993) terdapat 3 indikator partisipasi masyarakat 1. Partisipasi pada tahapan perencanaan. 2. Partisipasi pada tahapan pelaksanaan. 3. Partisipasi pada tahapan pemanfaatan[9]. Dengan tujuan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien dan sesuai dengan prioritas masalah yang disusun dalam RPJM-Des dan RKP-Desa Kedungbanteng. Dimana penyusunan dokumen RPJMDes dan RKP-Desa, Desa Kedungbanteng nyatanya masih belum maksimal dibuktikan dengan rendahnya kehadiran peserta rapat penyusunan RPJM-Des Tahun 2022.

Tabel: 1.1 Daftar Hadir Rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) 2022-2028 Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

NO	NAMA	UNSUR ATAU JABATAN
1	Sugianto	Gapoktan
2	Sujono	Tokoh Masyarakat
3	Bayu Dwi M	LPM
4	S. Badiatul	RT 01
5	Ismaimunah	BPD

6	M.Sidiq	RT 09
7	Suyanto	RW 08
8	Asroful	RT 04
9	Ikhwan	RT 02
10	Bukhori M	RW 03
11	Nurul Lailah	PKK
12	Miftachur R	RT 09
13	Komari	BPD
14	Siti Rokhimah	Kader
15	Nur Kholifatul U	Kader
16	Tahmimah	TPQ
17	Nurul Hidayati	Kader
18	Alfiyah	PKK
19	Hj.iim	RT 02
20	Rijalui M	RT 05
21	Suwito	Tokoh Masyarakat
22	Sudarmaji P.S	RW 04
23	Nikmatul Wahyuni	RA Aisyiyah 04
24	Heru Setiawan	BUMDES
25	Luqman Arif	Karang Taruna
26	Syaikhur R	RT 08
27	Nurul Rohmah	Sekdes
28	Suwanto	Tokoh Masyarakat
29	Qurotul Aini	Perangkat
30	Tabiin	RT 03
31	Haqqi	BUMDES
32	Muammal Hamidi	BPD
33	Mulyadi	RT 06
34	Dian Amri	Kaur Keuangan
35	Ainun Jariyah	RT 07
36	M. Hamdan T	Kasi Kesra

Sumber: Dokumen Desa Kedungbanteng Tahun 2022

Dari 70 total undangan yang telah di sebar dan bagikan, nyatanya hanya setengah yang menghadiri rapat penyusunan RPJM-Des yakni sebanyak 36 orang, sehingga berbagai usulan terkait kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya bisa tersampaikan karena rendahnya tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM-Des Desa Kedungbanteng.

Adapun Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian saat ini terkait Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pertama penelitian yang dilakukan oleh Fendi Widiatmoko, Eny Boedi Orbawati, Yunu Kurniasih tahun 2022 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027 Di Desa Cepedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo”. Yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan Masyarakat pada penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Cepedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sudah optimal. Terbukti dengan penggunaan indikator: aspek suara (voice), aspek akses, aspek control. Namun pada indikator aspek akses masih kurang karena tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan. Persamaan pada penelitian sebelumnya yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif serta sama-sama membahas tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya menggunakan teori dari Eko (2004) sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori Ericson dalam Slamet (1993).

Selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Karmita Aji, Eka Yulyana dan Evi Priyanti Tahun 2022 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang”. Yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan *purposive sampling*, serta menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang sudah optimal. Terbukti dengan penggunaan indikator seperti: Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, Partisipasi dalam

evaluasi. Persamaan pada penelitian sebelumnya yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif serta sama-sama membahas partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah berfokus pada pembangunan desa sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penyusunan RPJM-Des.

Ketiga, yakni penelitian oleh Arifandy Setyo Nugroho tahun 2021 yang berjudul “Partisipasi atau Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Sangheh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung”. Dimana pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penataan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Di Desa Sangheh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung cukup optimal. Dibuktikan dengan penggunaan indikator: Usia, Jenis kelamin, tingkat Pendidikan, tingkat pekerjaan, tingkat penghasilan, waktu domisili. Persamaan pada penelitian sebelumnya yakni sama menggunakan metode kualitatif serta membahas partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah memakai teori Holil (1980:8). Sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori dari Ericson dalam Slamet (1993).

Pada kenyataannya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penyusunan dokumen RPJM-Des di Desa Kedungbanteng masih belum optimal disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat Desa Kedungbanteng, kurangnya sosialisasi serta pemahaman masyarakat Desa tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM-Des.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk memilih tempat penelitian di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk melihat bagaimana keterlibatan serta partisipasi Masyarakat Desa Kedungbanteng dalam Penyusunan (RPJMDes) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sehingga peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”.

II. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dalam menginvestigasi peran masyarakat dalam proses penyusunan dokumen RPJM-Des di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen terkait RPJM-Des. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan RPJM-Des dengan merujuk pada tiga indikator partisipasi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Analisis data kualitatif mengikuti pendekatan interaktif Miles & Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [10].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM-Des di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Ericson dalam Slamet (1993), mengenai Partisipasi pada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pemanfaatan.

1. Partisipasi pada tahapan perencanaan (*Idea Planing Stage*)

Partisipasi pada tahapan perencanaan ini dapat diartikan sebagai keterlibatan atau partisipasi individu pada proses penyusunan rencana serta bagaimana strategi dan upaya dalam proses penyusunan kegiatan dan program. Masyarakat berpartisipasi dengan cara memberikan usulan atau pendapat, saran dan kritik, melalui pertemuan yang telah di laksanakan[11]. Keterlibatan Masyarakat pada tahapan perencanaan ini merupakan faktor yang sangat penting atau dapat di artikan pula bahwa Masyarakat harus terlibat serta berperan aktif dalam menyusun perencanaan desa, selain itu keterlibatan Masyarakat dapat dijadikan tolak ukur tingkat kesuksesan perencanaan maupun pembangunan[12]. Perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki arti suatu rangkaian atau suatu susunan proses yang akan dikerjakan. Sondang P. Siagian (1994:108) mengemukakan perencanaan adalah semua proses pemikiran dan penetapan yang di lakukan dengan matang dari berbagai hal yang di kerjakan di masa mendatang untuk mencapai tujuan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nurul Rohman sebagai Sekretaris Desa sekaligus ketua tim penyusun RPJM-Des menjelaskan bahwa urutan kegiatan dalam penyusunan RPJM-Des berupa penyebaran undangan pembentukan tim penyusun RPJM-Des. Kemudian di lanjutkan dengan rapat jaring aspirasi atau rapat

pengumpulan usulan, kemudian rapat pengesahan RPJM-Des, dan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen RKP-Des. Sebelum disusunnya Dokumen RPJM-Des, pemerintah Desa Kedungbanteng mengadakan beberapa kali rapat atau pertemuan, salah satunya yakni rapat Musyawarah Desa dalam rangka pembentukan tim penyusun RPJM-Des mengenai waktu, tempat serta agenda rapat yang akan dilaksanakan. Perihal permasalahan yang akan dibahas pada rapat ini berupa: Pembentukan tim Penyusun RPJM-Des, penetapan tim penyusun RPJM-Des, serta tanya jawab seputar permasalahan terkait RPJM-Des.

Tabel 3.1: Struktur Tim Penyusun RPJM-Des Desa Kedungbanteng

NO	NAMA	JABATAN
1	Budiono, S.Pd	Penanggung Jawab
2	Ismail	Pengesahan
3	Nurul Rohman	Ketua Tim
4	Bayu Dwi Manunggal	Sekretaris Tim
5	Dian Amri Prihatin	Anggota
6	Qurrotul Aini	Anggota
7	Heru Setyawan	Anggota
8	Suwono	Anggota
9	Sugianto	Anggota
10	Luqman Arif	Anggota
11	Hj. Chusnul Imama	Anggota
12	Nurul Laila	Anggota
13	Tabiin Ahmad	Anggota

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Kedungbanteng Tahun 2022*

Gambar diatas merupakan struktur tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang terdiri dari seluruh perwakilan Masyarakat Desa Kedungbanteng seperti: Pemerintah Desa, tokoh Masyarakat, LPM, RT, RW, BPD, PKK, TPQ, BUMDES, Kader, RA Aisyiyah dan Karang Taruna. Tujuan pembentukan tim RPJM-Des untuk mempermudah merancang rencana terkait pembangunan desa serta mempermudah menjangkau aspirasi dan usulan dari masyarakat tentang RPJM-Des di Desa Kedungbanteng

Setelah tim penyusun RPJM-Des terbentuk, pemerintah Desa Kedungbanteng Kembali melaksanakan rapat, yakni rapat jaring aspirasi atau usulan, dimana kegiatan ini bertujuan untuk menampung masukan, kritik dan saran dari Masyarakat. Dalam rapat tersebut biasanya tim penyusun RPJM-Des memberikan kesempatan kepada seluruh perwakilan Masyarakat untuk menyampaikan usulan



Gambar 3.1: Pelaksanaan Rapat Jaring Aspirasi Atau Pengumpulan Usulan
Sumber: *Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng Tahun 2022*

Gambar diatas merupakan kegiatan pelaksanaan rapat jaring aspirasi atau pengumpulan usulan masyarakat, dimana tujuan dari rapat tersebut adalah agar usulan-usulan dan pendapat Masyarakat dapat tertampung. Sehingga kebutuhan Masyarakat dapat terpenuhi, serta pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat Desa Kedungbanteng.

Setelah pelaksanaan rapat jaring aspirasi masyarakat dan usulan-usulan masyarakat telah tertampung, selanjutnya tim penyusun RPJM-Des melakukan penyusunan skala prioritas masalah atau Menyusun urutan

kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana hal ini bertujuan untuk menentukan kegiatan yang paling penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu.

Setelah tersusunnya prioritas masalah pemerintah desa Kedungbanteng kembali melakukan rapat, yakni rapat pengesahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Adanya rapat ini merupakan bentuk telah terselesaikannya penyusunan Dokumen RPJM-Des Desa Kedungbanteng.

Tabel: 3.2 Daftar Hadir Rapat Penetapan Dan Pengesahan dokumen RPJM-Des 2022-2028 Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

NO	NAMA	UNSUR ATAU JABATAN
1	Nurul Lailah	PKK
2	Ismaimunah	BPD
3	Mulyadi	RT 06
4	Ikhwan	RT 02
5	Asroful	RT 04
6	Djuproni	RW 01
7	Miftachur Roudli	RT 09
8	Sudarmaji	RW 04
9	Hariyanto	RT 03
10	Didik Fahrudin	Kasun
11	Dian Amri	Kaur Keuangan
12	Alfiyah	PKK
13	Abdus Salam	PLD

Sumber: Dokumen Desa Kedungbanteng Tahun 2022

Tabel diatas merupakan daftar hadir pada rapat penetapan dan pengesahan dokumen RPJM-Des 2022-2028 Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Selain rendahnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam Rapat Penyusunan RPJM-Des di Desa Kedungbanteng, rendahnya partisipasi atau keterlibatan Masyarakat juga di tunjukkan dalam Rapat Penetapan dan Pengesahan RPJM-Des di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Setelah penyusunan Dokumen RPJM-Des selesai, selanjutnya pemerintah desa melakukan penyusunan terkait Dokumen RKP-Desa. RPJM-Des berbeda dengan RKP-Des, RPJM-Des berisi aturan dan kebijakan pembangunan, rencana kegiatan dan pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan RKP-Desa memuat pokok-pokok kebijakan Pembangunan desa untuk mencapai tujuan serta visi-misi desa.

Dari hasil survei dan wawancara peneliti dengan Bapak Dian Amri Prihatin selaku kaur keuangan sekaligus salah satu anggota tim penyusun RKP-Desa menjelaskan bahwa setelah penyusunan RPJM-Des selesai, dilanjutkan dengan penyusunan RKP-Desa. Yang di dahului dengan pembentukan tim penyusun dokumen RKP-Desa, di lanjutkan dengan penentuan prioritas program Pembangunan selama jangka waktu 1 tahun sesuai berdasarkan dokumen RPJM-Des. Dan akan dilanjutkan dengan pengadaaan rapat pengesahan RKP-Desa

Jika Dokumen RPJM-Des merupakan dokumen konsep-konsep kegiatan desa untuk periode 6 tahun, berbeda dengan dokumen RKP-Desa yang merupakan dokumen perincian dari dokumen RPJM-Des untuk periode 1 tahun. RKP-Desa didahului oleh pembentukan tim RKP-Desa yang terbentuk dari seluruh perwakilan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa.



Gambar 3.2: Pelaksanaan MUSDES Dalam Rangka Pembentukan Tim RKP-Desa

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng Tahun 2022

Gambar diatas merupakan kegiatan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka pembentukan tim penyusun RKP Desa, dimana pada rapat pembentukan tim penyusun RKP-Desa ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Masyarakat desa maupun perwakilan pemerintah desa. Rapat pembentukan tim penyusun RKP-Desa ini dilaksanakan pada Selasa 16 November 2022 di balai Desa Kedungbanteng.

Tim penyusun RKP-Desa biasanya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh kepala desa, ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, dalam hal ini dijabat oleh sekretaris desa, sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim penyusun RKP-Desa yang mana dalam hal ini dijabat oleh perwakilan unsur LPMD, serta anggota yang terdiri dari seluruh perwakilan Masyarakat desa.

Tabel 3.3: Struktur Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kedungbanteng Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	PERWAKILAN DARI UNSUR
1	Nurul Rohman	Ketua	Perwakilan Dari Unsur Sekretaris Desa
2	Bayu Dwi Manunggal	Sekretaris	Perwakilan Dari Unsur LPMD
3	Sugianto	Anggota	Perwakilan Dari Unsur Pengusaha
4	Tabi'in Ahmad	Anggota	Perwakilan Dari Unsur RT
5	Istafuddin	Anggota	Perwakilan Dari Unsur Tokoh Masyarakat
6	Luqman Arif	Anggota	Perwakilan Dari Unsur Karang Taruna
7	Dian Amri Prihatin	Anggota	Perwakilan Dari Unsur Perangkat Desa

Sumber: *Buku Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kedungbanteng Tahun 2023*

Tabel diatas merupakan struktur tim penyusun (RKP-Desa) Desa Kedungbanteng Tahun 2023, sama halnya dengan tim penyusun RPJM-Des yang mana anggota timnya dipilih dari berbagai perwakilan Masyarakat desa. Tugas-tugas tim penyusun RKP-Desa adalah pemahaman dan penyesuaian rencana kegiatan program dan pembiayaan pembangunan desa, pencermatan ulang terhadap dokumen RPJM-Des, penyusunan dokumen RKP-Desa dan daftar usulan RKP-Desa, membentuk rencana kegiatan, desain teknis, serta anggaran kegiatan.

Setelah tim penyusun RKP-Desa ini terbentuk, maka tim akan segera Menyusun pengutamakan program dan pembangunan desa. Prioritas program serta pembangunan yang telah disusun dalam RKP-Desa ini biasanya merupakan prioritas Pembangunan yang dianggap sebagai kebutuhan utama Masyarakat desa, dikarenakan apabila tidak didahulukan akan menimbulkan masalah-masalah baru yang cukup kompleks.

Tabel: 3.8 Prioritas Program Pembangunan Desa Kedungbanteng tahun 2023

NO	Prioritas Program Pembangunan Dalam Bidang	Kegiatan Program Pembangunan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Program peningkatan kinerja dan disiplin aparatur pemerintah desa b. Program peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat desa c. Program legilasi desa d. Program pembaharuan data kependudukan e. Program penganggaran siltap dan operasional pemerintah desa f. Program pemberian insentif untuk kelembagaan Masyarakat desa
2	Bidang Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan dan fasilitas dasar program Kesehatan b. Pengembangan Sarana dan prasarana desa c. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan karang taruna b. Pembinaan karang werda c. Pembinaan kesenian dan sosial budaya (pawai budaya) d. Senam Bersama yang diikuti oleh masyarakat kecamatan Tanggulangin
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Program peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur desa b. Program operasional RT dan RW c. Program kerja PKK dan LKMD

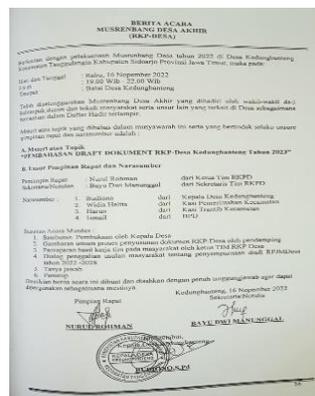
Sumber: *Buku Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kedungbanteng Tahun 2023*

Tabel diatas merupakan susunan prioritas program Pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana kerja pemerintah desa (RKP-Desa) tahun 2023 dalam berbagai bidang, mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari 6 program pembangunan, bidang pembangunan desa yang terdiri dari 3 program pembangunan, bidang pembinaan masyarakat desa yang terdiri dari 4 program pembangunan serta bidang pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri dari 4 program pembangunan.

Tujuan disusunnya prioritas Pembangunan dalam RKP-Desa ini adalah terwujudnya rencana Pembangunan yang baik serta tepat sasaran, tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa maju, mandiri dan Sejahtera. Selain itu juga sebagai konsep rujukan bagi seluruh pemerintah desa dalam penyusunan program Pembangunan serta kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan visi misi yang telah ditetapkan pada dokumen RPJM-Des.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Dian Amri Prihatin selaku kaur keuangan sekaligus salah satu anggota tim penyusun RKP-Desa Desa Kedungbanteng menjelaskan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan di desa kedungbanteng memang rendah, contohnya beberapa kali diadakan rapat RPJM-Des dan RKP-Desa hanya beberapa orang yang menghadiri.

Selanjutnya apabila prioritas program pembangunan telah tersusun dalam RKP-Desa, maka pemerintah desa beserta Masyarakat desa akan mengadakan rapat terkait pengesahan RKP-Desa. Kegiatan rapat pengesahan ini merupakan kegiatan akhir yang mana menandakan bahwa penyusunan terkait dokumen RKP-Desa telah selesai disusun dan telah disepakati Bersama.



Gambar 3.3: Undangan Rapat Pengesahan Dokumen RKP-Desa Desa Kedungbanteng Tahun 2023
Sumber: Lampiran Buku Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungbanteng Tahun 2023

Gambar diatas merupakan lampiran undangan rapat pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), dimana rapat ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 16 November 2022 bertempat di balai desa Kedungbanteng, topik yang akan dibahas adalah: pemaparan hasil Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), Pembahasan draft dokumen serta pengesahan dokumen RKP-Desa Desa Kedungbanteng tahun 2023.

Terkait hasil penelitian pada indikator partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Valentina Ayu Hastika Hagang, dkk (2019) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Dempas Kecamatan Nyuantan Kabupaten Kutai Barat, terkait partisipasi dalam tahapan perencanaan juga belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat hanya dilibatkan dua kali pelaksanaan rapat, setelah itu masyarakat tidak dilibatkan kembali, sehingga masyarakat kurang mengetahui perihal permasalahan, perencanaan, pelaksanaan dan kebutuhannya. yang terjadi, perencanaan yang akan dilaksanakan, serta kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi pada tahapan pelaksanaan (*Implementation Stage*)

Partisipasi atau keterlibatan pada tahapan pelaksanaan dapat diartikan dengan keterlibatan seseorang saat pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, baik berupa tenaga, uang, materi dan barang, serta dapat berupa gagasan, saran atau usulan sebagai bentuk partisipasi atau keterlibatan pada pekerjaan atau proyek tersebut[13]. Made Pidarta dalam Siti Irine Astuti D. (2009:31-32) Menjelaskan bahwa partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam sebuah kegiatan, baik berupa kegiatan mental, emosi dan fisik dengan memakai keahlian yang dimiliki (inisiatif) dalam semua kegiatan, mendukung tujuan dan tanggung jawab dengan keterlibatan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Hamdan Toyyiban selaku Kaur perencanaan Desa Kedungbanteng menjelaskan bahwa pembangunan desa terdiri dari 2 jenis Pembangunan yaitu Pembangunan fisik dan non fisik. Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik sudah sangat baik karena masyarakat banyak terlibat.

Partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan merupakan salah satu faktor penting agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 di Desa Kedungbanteng merupakan pembangunan yang cukup penting untuk dilaksanakan, karena pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Tabel 3.5: Program Pembangunan Desa Kedungbanteng Tahun 2023

NO	JENIS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	TAHUN
1	Pembangunan- Pembangunan Fisik	1. Pembangunan jalan paving RT 04 dan RW 02	2023
		2. Peninggian halaman TK Dharma Wanita	2023
		3. Pembangunan Jogging Track dan Taman Bermain	2023
2	Pembangunan- Pembangunan Non Fisik	1. Program BPNT dan PKH	2023
		2. Program Rembuk Stunting dan Posyandu	2023
		3. Pos Bindu dan Posyandu Lansia	2023
		4. Koperasi Wanita dan PKK	2023
		5. Gapoktan	2023

Sumber: Data Oleh Penulis

Tabel diatas merupakan Pembangunan yang telah terlaksana pada tahun 2023, yang mana pembangunan tersebut merupakan kebutuhan Masyarakat yang cukup kompleks. Pembangunan Fisik seperti pembangunan jalan paving pada RT 04 dan RW 02, halaman TK Dharma Wanita, jogging track dan taman bermain. Sedangkan Pembangunan non fisik seperti rembuk stunting, posyandu, posbindu, dan posyandu lansia, dll.

Pembangunan fisik merupakan beberapa pembangunan yang dapat dilihat mata contohnya seperti: Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan bangunan (Kuncoro 2010:20). Pembangunan fisik memiliki kedudukan yang sangat penting agar dapat memudahkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan dasar baik sosial maupun ekonomi[14] Sedangkan Wresniwiro menjelaskan bahwa Pembangunan non fisik merupakan sebuah pembangunan yang terbentuk dari kemauan Masyarakat serta memiliki kurun waktu yang cukup lama contohnya seperti: Upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesehatan Masyarakat desa.

Bapak Dian Amri Prihatin selaku Kaur keuangan juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah maksimal karena sistemnya menggunakan sistem Swakelola atau pengerjaan sendiri, Dimana orang yang mengerjakannya merupakan orang yang ahli dalam bidangnya. Selain itu kesuksesan Pembangunan desa yang telah terlaksana tidak luput dari partisipasi Masyarakat kedungbanteng itu sendiri dimana dalam tahap Pembangunan ini, Masyarakat desa kedungbanteng sudah cukup maksimal, sehingga pembangunan yang dilaksanakan terselesaikan dengan cepat.



Gambar 3.4: Pembangunan Jalan Paving, Halaman TK Dharma Wanita, Taman Bermain dan *Jogging Track*

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan proses Pembangunan jalan paving, peninggian halaman TK Dharma Wanita, Pembangunan taman bermain dan *jogging track* yang mana dalam proses pengerjaannya Masyarakat desa kedungbanteng bergotong royong dalam Pembangunannya. Selain itu Masyarakat juga menerapkan sistem Swakelola, yang artinya baik perencanaannya, pengerjaannya serta pengawasannya dilakukan sendiri oleh pelaksanam swakelola, agar Masyarakat dapat memantau sendiri proses pemabngunannya

Bapak Dian Amri Prihatin selaku Kaur keuangan juga menegaskan bahwa Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat. Selain Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, ada juga beberapa pembangunan yang bersifat non fisik seperti PKH dan BPNT, Rembuk stunting dan posyandu, posbindu, posyandu lansia, koperasi Wanita, gapoktan dan PKK.



Gambar 3.5: Penyaluran Program BPNT dan PKH
Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan penyaluran bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), PKH sumber dananya berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota. Sedangkan BPNT merupakan bantuan yang berupa sembako atau beras, yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa kedungbanteng.

Selain program yang telah dijelaskan tadi, desa kedungbanteng juga melakukan Upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui beberapa program Kesehatan seperti rembuk stunting dan posyandu balita. Stunting merupakan gagalnya pertumbuhan yang diakibatkan kurangnya asupan gizi. Sedangkan posyandu balita adalah pelayanan pada balita dengan memberikan pelayanan Kesehatan kepada balita.



Gambar. 3.6: Pelaksanaan Rembuk Stunting dan Posyandu Balita
Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan pelaksanaan rembuk stunting dan pelaksanaan posyandu balita, rembuk stunting diadakan dengan tujuan Menyusun program penurunan dan pencegahan stunting. Sedangkan posyandu balita bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memberikan beberapa pelayanan kesehatan anak seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan serta penyuluhan.

Selain program Kesehatan untuk balita, desa kedungbanteng juga melaksanakan program Kesehatan untuk orang dewasa berupa program posbindu (Pos Binaan Terpadu) yakni kegiatan monitoring dan deteksi untuk penyakit tidak menular. sedangkan posyandu lansia untuk lanjut usia berupa pemeriksaan Kesehatan pemberian makanan tambahan, kegiatan olahraga berupa (senam & gerak jalan), dll.



Gambar 3.7: Pelaksanaan Program Posbindu Dan Posyandu Lansia
Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan pelaksanaan program posbindu (Pos Binaan Terpadu) yang diperuntukan untuk orang dewasa dengan tujuan pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dan gangguan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Dan pelaksanaan posyandu lansia memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi antara Masyarakat lanjut usia juga bermanfaat untuk menjaga kualitas hidup lansia dalam segi Kesehatan.

Koperasi Wanita Sumber Jaya dan PKK Desa Kedungbanteng juga merupakan salah satu kelompok organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan Masyarakat desa kedungbanteng untuk ikut andil dalam Pembangunan Indonesia, khususnya kaum Wanita.



Gambar 3.8: Rapat Anggota Tahunan Koperasi Wanita Dan Pertemuan Rutin PKK
Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan kegiatan rapat anggota tahunan koperasi wanita sumber jaya yang ada di desa kedungbanteng ini, tidak hanya seputar kegiatan simpan pijam saja, ada juga beberapa pelatihan dan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan pertemuan rutin PKK dan Pokja untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi.

Agar kualitas sumber daya manusia desa kedungbanteng dalam bidang pertanian dapat meningkat, dibentuklah Gabungan Kelompok tani atau gapoktan. Dimana gapoktan terdiri dari gabungan beberapa kelompok tani yang melaksanakan usaha di bidang pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan usaha dalam bidang pertanian bagi para anggota dan petani lainnya.



Gambar 3.9: Rapat Rutin Anggota Gapoktan
Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan kegiatan rapat rutin anggota gapoktan, dalam kegiatan tersebut biasanya akan diisi dengan diskusi terkait permasalahan yang ada, serta kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para petani desa kedungbanteng agar dapat memberikan tindakan saat tanaman pertanian serta saat diserang hama atau penyakit. Sehingga dapat mengurangi serta terhindar dari gagal panen.

Penelitian pada indikator partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan (*Implementation Stage*) tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Shania Fonika Intan Umboh, dkk (2020) yang berjudul Partisipasi atau Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Jembatan Perkebunan Di Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan sudah cukup baik, dimana masyarakat desa telah memberikan sumbangsih berupa makanan, minuman pada saat kerja bakti pemberishan daerah sungai. selain itu juga mereka memberikan motivasi kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembangunan.

3. Partisipasi pada tahapan pemanfaatan (*Utilitazion Stage*)

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat pada tahapan pemanfaatan merupakan keterlibatan individu dalam tahap pemanfaatan sebuah kegiatan atau proyek setelah selesai. Keterlibatan pada bagian ini biasanya berupa energi dan materi untuk mengelola dan merawat proyek yang telah dilaksanakan[15]. Sumardi (2010:46) menjelaskan partisipasi adalah peran seseorang dalam tahapan pembangunan baik memberi ide, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta juga terlibat dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ibu Iswatun Khasanah menjelaskan bahwa Dari Pembangunan fisik yang dilaksanakan, sudah banyak dirasakan manfaatnya bagi Masyarakat. Salah

satunya yakni jalan yang ada di RT 04, RW 02 dan halaman TK Dharma Wanita, dulu sebelum dipasang paving block becek dan banyak rumput liar tetapi sekarang sudah tidak becek.

Partisipasi dalam tahapan pemanfaatan di desa kedungbanteng tampaknya telah dimanfaatkan dengan baik dan maksimal, dilihat dari beberapa pemanfaatan jalan dan Pembangunan halaman TK Dharma Wanita yang telah di lakukan pembangunan sehingga kondisinya tampak lebih baik dan nyaman digunakan.



Gambar 3.10: Kondisi Jalan Dan Halaman TK Dharma Wanita Setelah Di Laksanakan Pembangunan
Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan peninjauan jalan yang telah selesai dilakukan Pembangunan berupa pemasangan paving block serta kondisi halaman TK Dharma Wanita yang sudah dipasang paving block. Tujuan dipasangnya paving block adalah agar pada saat musim hujan jalan dan halaman TK Dharma Wanita menjadi tidak becek, tidak berdebu, lebih nyaman, indah, *aesthetic* dan tidak ditumbuhi rumput liar.

Pembangunan-pembangunan yang telah dijelaskan merupakan Pembangunan fisik yang meliputi sarana-prasarana pemerintah dan fasilitas umum contohnya: jalan, jembatan, irigasi, taman bermain, dll. Sedangkan Pembangunan non fisik seperti peningkatan perekonomian, Pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dll.

Hasil wawancara dengan Ibu Jumiati yakni salah satu warga yang menerima bantuan PKH sekaligus BPNT, beliau menjelaskan bahwa Sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH dan BPNT ini, meskipun tidak besar tapi cukup meringankan kebutuhan harian.

Bantuan PKH dan BPNT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui bantuan yang telah diadakan. PKH merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan BPNT merupakan bantuan berupa beras atau bahan pokok lainnya.

Selain itu ada juga beberapa program dalam bidang Kesehatan yang dilakukan di desa kedungbanteng, mulai dari kegiatan rembuk stunting, posyandu balita, dewasa sampai lanjut usia. Manfaat dari adanya program ini adalah untuk menjaga stabilitas kesehatan Masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam bidang kesehatan.

Ibu Mukhlisah salah satu peserta posyandu balita sekaligus peserta posbindu menegaskan bahwa Banyak manfaat yang di dapat dari posyandu balita maupun posbindu. Dimana dalam posyandu balita dapat mengetahui kesehatan pada ibu dan bayi saat hamil. Sedangkan pada saat posbindu, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan diri sendiri.

Tujuan utama diadakannya program posyandu balita adalah untuk mencegah peningkatan angka kematian pada ibu dan bayi, saat persalinan serta untuk memantau pertumbuhan pada anak. Sedangkan posbindu bertujuan meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dari resiko Penyakit Tidak Menular (PTM).

Selain posyandu balita dan posbindu, desa kedungbanteng juga memiliki program posyandu lansia. Hasil wawancara penulis dengan salah satu peserta posyandu lansia ibu Nurul Khafidhoh menjelaskan bahwa Manfaat dari adanya program posyandu lansia ini sebenarnya sangat banyak, salah satunya adalah dapat mengetahui kondisi kesehatan para lansia.

Tujuan utama dari adanya posyandu lansia adalah untuk membantu para lansia agar tetap sehat, baik secara fisik maupun psikis, Membantu mendeteksi penyakit pada lansia, serta sarana lansia untuk meningkatkan interaksi sosial dengan sesama warga lansia sehingga dapat memperbaiki kondisi psikologisnya. Adanya Program ini di peruntukkan untuk para lanjut usia yang berumur 60 tahun keatas.

Selanjutnya, dalam pemberdayaan Perempuan desa kedungbanteng memiliki program khusus wanita, yaitu PKK dan Kopwan. PKK berfokus kepada pemberdayaan keluarga. Sedangkan Kopwan lebih fokus pada kegiatan simpan pinjam dan kegiatan pelatihan serta beberapa kegiatan lainnya.



Gambar 3.11: Pertemuan Anggota PKK, Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Outbound Anggota Kopwan
 Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan pertemuan rutin anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelatihan pembuatan bros dan kegiatan Outbound anggota Koperasi Wanita (Kopwan), kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kemampuan, selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi antar sesama anggota PKK maupun anggota Kopwan desa kedungbanteng.

Sedangkan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat desa kedungbanteng di bidang pertanian, dibentuklah Gapoktan atau gabungan kelompok tani, gapoktan berfungsi sebagai media musyawarah petani yang memiliki peran akselerasi kegiatan bidang pertanian (Sunanto 2004).



Gambar 3.12: Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk dan Pengenalan Obat-Obatan Tanaman Pertanian
 Sumber: Arsip Dokumen Desa Kedungbanteng

Gambar diatas merupakan kegiatan pembuatan pupuk dan pengenalan obat-obatan pertanian, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat desa kedungbanteng dapat melakukan Tindakan tepat apabila terjadi permasalahan terkait pertanian, serta untuk mengetahui dan memilih pupuk dan obat pertanian yang benar. Penelitian pada indikator partisipasi masyarakat dalam tahapan pemanfaatan (*Utilitazion Stage*) tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Karmita Aji, dkk (2022) terkait partisipasi dalam tahapan pemanfaatan sudah dapat dikatakan baik, yang dibuktikan dengan pembangunan yang telah di laksanakan seperti pengecoran aspal jalan, Pembangunan saluran drainase, penurapan jalan dan jembatan.

IV. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian tentang partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari 3 aspek dapat di tarik kesimpulan. **Pertama**, partisipasi pada tahapan perencanaan (*Idea Planing Stage*) masih belum optimal hal ini dibuktikan dengan beberapa kali diadakannya rapat terkait penyusunan RPJM-Des maupun RKP-Desa, tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat desa kedungbanteng masih kurang dari 50%, dari total undangan yang telah disebar. **Kedua**, Partisipasi pada tahapan pelaksanaan (*Implementation Stage*) sudah optimal, yang mana dibuktikan oleh beberapa pembangunan fisik oleh desa yang menerapkan swakelola atau bisa diartikan dengan pengerjaan sendiri oleh masyarakat desa kedungbanteng. Proses pelaksanaan pembangunannya memang dilakukan sendiri oleh masyarakat desa, meskipun orang yang melaksanakan pembangunan tersebut merupakan masyarakat pilihan yang ahli dalam bidangnya yang juga mendapatkan honor. Sedangkan dalam pembangunan nonfisik juga sudah optimal dimana masyarakat desa banyak terlibat aktif dalam kegiatan PKH, BPNT, BLT serta juga aktif terlibat dalam beberapa kegiatan lain seperti Rembuk Stunting, Posyandu Balita, Posbindu, Posyandu Lansia, PKK, Kopwan, Gapoktan. **Ketiga**, Partisipasi pada tahapan pemanfaatan (*Utilitazion Stage*) juga sudah maksimal hal ini dibuktikan dengan pemanfaatan dari pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan pembangunan halaman TK Dharma Wanita menggunakan paving *block* yang sudah dirasakan oleh masyarakat desa, dimana sebelum pembangunan jalan ini dilakukan, pada musim hujan jalan rusak parah disertai becek, akan tetapi saat ini meskipun musim hujan jalan sudah tidak becek lagi serta nyaman dilalui, selain itu sebelum pembangunan dilakukan banyak rumput liar yang tumbuh akan tetapi saat sudah dilakukan pembangunan ini, rumput liar sudah tidak tumbuh kembali. Selanjutnya dalam pembangunan nonfisik juga sudah berjalan maksimal dibuktikan dengan beberapa bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti PKH, BPNT, BLT sehingga masyarakat merasa terbantu dalam hal kebutuhan. Selain itu dengan adanya beberapa organisasi dan kegiatan seperti Rembuk Stunting, Posyandu Balita, Posbindu, Posyandu Lansia, PKK, Kopwan, Gapoktan, Masyarakat sudah merasakan manfaatnya, baik dalam bidang kesehatan, pertanian dan pemberdayaan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. V. Onsu, F. M. . Tulusan, and R. Mambo, “Pengaruh Kompetensi Kepala Desa Terhadap\Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2018.
- [2] J. Ilmiah and W. Pendidikan, “1 , 2 , 3 1,” vol. 9, no. 10, pp. 595–603, 2023.
- [3] F. Widiatmoko, E. B. Orbawati, and Y. Kurniasih, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo,” *PESIRAH J. Adm. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 90–97, 2023, doi: 10.47753/pjap.v3i2.49.
- [4] I. K. . Suarjaya, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung,” *Widyanata*, vol. 18, no. 1, pp. 30–37, 2021, doi: 10.54836/widyanata.v18i1.602.
- [5] S. Saraswati and N. Hariyanto, “Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA),” *Kementeri. Desa, Pembang. Drh. Tertinggal dan Transm. Republik Indones.*, vol. 4, no. 5, 2019, [Online]. Available: <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Buku-4-Teknik-Penyusunan-RPJM-Desa.pdf>.
- [6] R. Saifuddin, I. Nurachmi, and D. Ferdiansyah, “Kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi lampung kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi lampung,” vol. 10, no. 3, pp. 309–322, 2022.
- [7] Musta’ana, “Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban,” *J. Ilm. Adm. Negara*, pp. 1–7.
- [8] A. A. Rosyada, “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda,” *e-Journal Ilmu Pemerintah.*, vol. 4, no. 1, pp. 102–114, 2016.
- [9] C. Maria Dimova and P. M. R. Stirk, “濟無No Title No Title No Title,” pp. 9–25, 2019.
- [10] A. Tujuan *et al.*, “Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado,” *J. Adm. Publik*, vol. 6, no. 89, pp. 41–47, 2020.
- [11] S. Fonika, I. Umboh, E. P. Manginsela, V. Richard, and B. Moniaga, “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN Desa Kaneyan adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah pekebun yang menguasai lahan pertanian pada lahan perkebunan yang relatif luas . Letak perkebunan-perkebunan tersebut berada jauh mempersingkat an,” vol. 16, pp. 269–278, 2020.
- [12] Ri. A. Artisa, “STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA. STUDI KASUS: DESA CIBURIAL, KECAMATAN CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT,” *Inov. Pembang. J. Kelitbangan*, vol. 11, no. 01, p. 61, 2023, doi: 10.35450/jip.v11i01.349.
- [13] H. V. A. Astika, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Nyuatan Kabupaten Kutai Barat,” *eJournal Ilmu Pemerintah.*, vol. 7, no. 2, pp. 519–530, 2019.
- [14] M. Rizki, N. Salam, and S. Harianto, “KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN RATIONALITY OF COMMUNITY HANDING OVER LAND IN ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN TUNGGUL VILLAGE , PACIRAN DISTRICT , LAMONGAN REGENCY,” vol. 10, no. 3, 2022.
- [15] O. L. Hakim, S. Ag, and M. Si, “KABUPATEN KARAWANG,” vol. 2, no. 2, pp. 43–53, 2017.